**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Paling tidak terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa yaitu kekayaan alam dan kualitas penduduknya. Dengan kekayaan alam berlimpah suatu negara memiliki modal untuk membangun bangsanya. Namun hal ini kurang maksimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan. Banyak negara maju di dunia dapat manggapai kesuksesan hanya dengan mengandalkan kualitas manusianya. Kekayaan alam yang sedikit bukan penghambat bagi negara tersebut untuk menguasai perekonomian dunia..

Dari sisi kuantitas jumlah penduduk Indonesia tergolong besar. Namun, secara kualitas penduduk Indonesia masih tertinggal dari negara lain, terutama dengan negara maju. Kalau besarnya jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan mutu dan produktivitasnya, Keadaan ini tentu sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, kualitas dan produktivitas yang tinggi harus seiring dengan jumlah penduduk yang besar. *United Nation Development Programme* (UNDP) mengembangkan kriteria kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Muslih, 2015:25).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 IPM Indonesia tercatat 71,92. Kalau melihat tahun 2018 nilainya melonjak sekitar 0,53 poin atau meningkat sekitar 0,74 persen. Anak yang dilahirkan pada tahun 2019 mempunyai harapan hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan anak yang dilahirkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pelajar yang berumur 7 tahun mempunyai peluang bisa sekolah selama 12,95 tahun (sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tingkatan D1), lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Masyarakat yang berumur 25 tahun ke atas umumnya telah mengeyam pendidikan selama 8,34 tahun (sama dengan waktu pendidikan untuk menyelesaikan jenjang kelas IX), lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia guna memenuhi kebutuhan hidup pada tahun 2019, mencapai sekitar sebesar 11,30 juta rupiah per tahun, naik 240 ribu rupiah jika dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya. (bps.go.id, 2019)

Walaupun IPM Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun sumber daya manusia Indonesia belum cukup untuk dikatakan berkualitas.

Indonesia berada pada rangking 6 ASEAN dan 111 di dunia dari 189 negara, jika melihat pada IPM versi UNDP seperti yang dirilis oleh BPS di atas Indonesia ada pada posisi tengah baik di ASEAN maupun di dunia, . Dalam hal IPM di kawasan Asia Tenggara Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei, dan Malaysia, untuk keempat indikator yang diukur tadi Indonesia tertinggal. Namun jika dibandingkan dengan Thailand. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia unggul dalam lama waktu.. Jika dibandingkan dengan Filipina Indonesia hampir unggul dalam semua aspek kecuali dalam hal rata-rata lama waktu mengenyam pendidikan.(Citradi, CNBC Indonesia: 2020).

Kalau kita perhatikan kriteria IPM tersebut, minimal ada 3 faktor yang menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu negara, yaitu kualitas kesehatan yang ditentukan oleh tinggi rendahnya angka harapan hidup, kualitas ekonomi yang diukur dengan besar kecilnya pendapatan perkapita, dan kualitas pendidikan yang diukur oleh seberapa lama seseorang itu mengeyam pendidikan.

Dari ketiga faktor tersebut peningkatan kualitas pendidikan adalah yang paling penting, karena kualitas kesehatan dan kualitas ekonomi bisa saja di dapatkan dengan pendidikan yang berkualitas. Orang yang berpendidikan tinggi tentunya ia mempunyai kualitas pribadi yang tinggi pula, dengan begitu ia akan mudah memenangkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, dengan pekerjaan itu ia akan mendapat sejumlah imbalan dan mungkin kualitasnya akan dihargai dengan imbalan yang tinggi, dengan pekerjaan dan imbalan tersebut tentunya ia akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika dilihat dari lamanya sekolah, pada tahun 2015, rata-rata lama sekolahnya adalah 8,32 tahun. Rata-rata tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 8,42 dan meningkat kembali pada tahun 2017, yaitu 8,5 tahun. Pada 2018, rata-rata lama sekolah di Indonesia mencapai 8,58 tahun atau setingkat dengan kelas VIII SMP/sederajat. Sayangnya, angka rata-rata lama sekolah pada 2018 belum memenuhi target Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Selain itu, target RPJMN tahun 2019 pun tak terpenuhi: rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,8 tahun atau setara dengan kelas VIII SMP (Gerintya, tirto.id)

Melihat data kondisi pendidikan yang seperti ini, maka jelas bahwa kondisi pendidikan di Indonesia belum memuaskan, Karenanya diperlukan sebuah kajian yang menyeluruh bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan pendidikan tersebut baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

 Kesadaran akan pentingnya pendidikan ini sebenarnya sudah dimulai oleh para pendiri bangsa ini sejak Indonesia masih dijajah, mereka menyadari salah satu penyebab susahnya bangsa ini terlepas dari belenggu penjajahan karena masyarakat kita masih banyak bodoh. Oleh sebab itu ketika Indonesia merdeka, di dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dicantumkan sebagai tujuan negara Indonesia, selanjutnya dinyatakan pula bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hal tercantum pada pasal 31 ayat 1. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 5 dikatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat” (Harapan:325)

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut maka semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang baik. Rakyat siapapun dan dimanapun mereka baik kaya maupun miskin, baik di kota atau di desa bahkan di daerah terisolir sekalipun harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bersekolah. “Secara filosofis pendidikan merupakan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya pendidikan bersifat terbuka, demokratis, tidak deskriminatif, dan menjangkau semua warga negara tanpa kecuali” (Yusuf, 2003:3).

 Namun kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang berada pada usia sekolah tetapi tidak mampu mendapatkan pendidikan secara layak. Di tahun 2019 walaupun animo anak-anak Indonesia untuk terus bersekolah angkanya terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, secara keseluruhan jumlah anak yang harus berhenti sekolah di seluruh provinsi di Indonesia masih berada di kisaran 4,5 juta anak.

Dari data yang dipunyai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah. Sehingga secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332 (ABC, 2019)

Sedangkan menurut BPS, data kependidikan Indonesia pada tahun 2019 angka putus sekolah masih cukup tinggi yaitu 26,17% dan umumnya anak Indonesia mulai mengalami putus sekolah pada pada jenjang pendidikan SMA kisaran usia 16-18 tahun dan Perguruan Tinggi kisaran usia 19-24 tahun (bps.go.id, 2019).

Dari riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, didapatkan hasil bahwa sekitar 47,3% responden mengatakan mereka berhenti sekolah karena masalah ekonomi, kemudian 31% karena ingin menolong orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal lainnya seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Sementara itu Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena), Budi Trikorayanto mengakui bahwa masalah keuangan masih menjadi faktor terbesar yang menyebabkan anak terpaksa berhenti sekolah. Senada dengan hal tersebut, Abduh Zen, Ketua Litbang PB PGRI dan Direktur Institute for Education Reform melihat bahwa faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi pemicu yang paling besar anak putus sekolah ([CNN Indonesia](http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/): 2017).

Khusus daerah-daerah terpencil selain faktor ekonomi banyaknya anak putus sekolah juga disebabkan oleh karena tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai seperti gedung, sarana penunjang operasional sekolah seperti alat tulis dan buku penunjang, dan juga guru.

Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan angka partisasi sekolah penduduk Indonesia baik di bidang sosial maupun dibidang lingkungan. Di bidang sosial pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan seperti Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sekolah gratis, bidik misi dan universitas terbuka, Sedangkan di bidang lingkungan pemerintah juga meluncurkan berbagai program seperti program Pendidikan Daerah Terpencil, Terluar, Terisolir dan **program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang salah satu sub programnya adalah Sarjana Mendidik Daerah 3T (SM-3T).**

**Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, tentunya tidak cukup hanya dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah saja (kuantitas), tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan mutu (kualitas) dari pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan akan tercermin dari berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil belajar mereka.**

**Dalam buku yang ditulis oleh Sutrisno, Beeby mengatakan bahwa “pendidikan mempunyai kualitas tinggi bilamana keluaran pendidikan itu mempunyai nilai tinggi bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan itu” (Sutrisno, 2019:64).**

**Untuk menentukan apakah sesuatu itu berkualitas atau tidak maka diperlukan suatu standar. Menurut Suharsimi Arikunto "standar adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan atas sumber, prosedur dan manajemen yang efektif. Sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran keadaan yang dikehendaki” (Majid, 2008:5).**

**Untuk mewujudkan kualitas pendidikan ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah menetapkan “Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas delapan standar, yaitu standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, , pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian”. (PP No.19 Tahun 2005).**

**Kalau kita sederhanakan, jika pengelolaan suatu lembaga pendidikan sejalan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan tentunya lembaga pendidikan tersebut akan mampu mencetak para peserta didik menjadi lulusan yang berkualitas. Menurut Didik Suhardi indikator mutu pendidikan adalah “kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang meliputi kemampuan kecakapan hidup *(life skills)* yang mencakup kecakapan sosial (*social skills)*, kecakapan akademik *(academic skills),* kecakapan personal *(personal skills),* dan kecakapan vokasional *(vocasional skills)”* (Kemdikbud, 2010:20).**

Sudjana berpendapat bahwa hasil belajar adalah “kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah dia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar terbagi menjadi 3 ranah yaitu, ranah kognitif pengetahuan, ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan)”. (Sudjana, 2009 : 22)

**Hasil belajar yang baik tentunya tidak datang begitu saja tetapi harus dimulai dari merancang sistem pendidikan yang baik pula. Kalau kita melihat beberapa kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah mulai dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai satu dari empat tujuan negara Indonesia, kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 juga mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan , kemudian terbitnya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, kemudian disusul pula oleh terbitnya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka proses untuk mendapatkan lulusan dengan hasil belajar yang berkualitas sudah sangat baik.**

**Kalau kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, idealnya mutu pendidikan yang tercermin dari hasil belajar para peserta didik dapat tercapai, namun usaha untuk mengangkat** kualitas pendidikan tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat**.**

**Di dalam kerangka manajemen pendidikan, pengelolaan hasil belajar harus dilakukan secara menyeluruh yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan semua sub sistem manajemen pendidikan yaitu manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen masyarakat.**

Sentral pelayanan pendidikan terletak pada peserta didik, oleh sebab itu pengelolaan manajemen peserta didik sebagai subtansi dari manajemen pendidikan sangat krusial. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam manajemen peserta didik. Pertama peran manajemen peserta didik adalah sebagai tempat untuk mengembangkan diri pada siswa dengan semaksimal mungkin. Kedua pelaksanaan manajemen peserta didik haruslah memotivasi kemandirian peserta didik Ketiga anak didik dipandang sebagai individu yang memiliki kekuatan untuk berkembang. Guru harus mampu menciptakan suatu situasi yang mendukung perkembangan anak secara utuh. Dan salah satu pendekatan yang dipakai dalam manajemen peserta didik adalah pendekatan kualitatif. Anggapan dasar dari pendekatan ini adalah ”jika peserta didik senang dalam belajar maka mereka dapat belajar dengan baik dan senang pula untuk mengembangkan diri mereka sendiri”. (Imron, 2003:53).

Dari semua yang telah diungkapkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari manajemen peserta didik adalah memberikan pembelajaran kepada siswa yang menarik dan menyenangkan agar mereka dapat tumbuh maksimal sejalan dengan kemampuan yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaannya, walaupun pada prinsipnya pendidikan itu baik, namun bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan yang secara umum disebut salah didik. Ini dapat saja terjadi sebab guru itu adalah manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengembangan potensi diri seorang peserta didik tergantung pada dua faktor, yaitu kualitas potensi diri dari anak itu sendiri (intrinsik) dan kualitas kependidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan terhadap perkembangan potensi anak tersebut (ekstrinsik).

Dengan tidak mengesampingkan peran standar pendidikan dan sub sistem manajemen pendidikan yang lain, di dalam proses pembelajaran perhatian terhadap peran standar tenaga pendidik dan manajemen tenaga kependidikan amatlah besar, sebab pada prinsipnya pendidiklah yang menjadi ujung tombak keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu guru dituntut harus mampu untuk mengelola proses pembelajaran dengan baik agar para siswa memperoleh hasil belajar yang optima, guru juga harus mampu memotivasi siswa untuk terus belajar dan juga harus terus meningkatkan kompetensi mereka sendiri sebagai pendidik.

Menurut LouAnne Johnson ”ketika seorang anak percaya bahwa kesuksesan itu mungkin, mereka akan mencoba. Namun jika mereka tidak yakin dapat sukses, semudah apapun materi atau sepandai-pandainya anak tersebut, mereka akan gagal” (Johnson, 2009:16).

Dari sini tampak pentingnya motivasi. Seorang guru harus mampu menyakinkan bahwa belajar itu penting dan dengan belajar mereka akan sukses. Jika mereka sudah yakin bahwa sukses itu mungkin, maka dengan sendirinya mereka akan belajar dengan atau tanpa guru sekalipun.

Semua manusia yang lahir di bumi ini memang telah dianugerahi berbagai kemampuan. Kemampuan tersebut berupa kecerdasan yang beragam (*multiple intelligence*). Menurut Gardner ”manusia memiliki tujuh kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal” (Elfachmi, 2016:9).

Potensi-potensi kecerdasan ini tentunya berbeda pada setiap anak, ada yang cerdas bermusik namun lemah dalam matematika, ada yang cerdas dalam berbahasa namun lemah dalam bermusik dan sebagainya, pendek kata sukar sekali kita menemukan dua orang anak atau lebih yang memiliki potensi yang sama, atau dengan kata lain setiap anak memiliki kekhasan masing-masing.

Usaha untuk memperhatikan peserta didik sesuai dengan kekhasannya adalah sesuatu yang baik, namun dalam implementasinya sepertinya hal ini adalah sesuatu yang sulit. Bagaimana seorang guru matematika menghadapi seorang siswa yang lebih senang olahraga dibandingkan pelajaran matematika. Apakah siswa itu disuruh diam saja atau malah disuruh keluar. Inilah tantangan seorang guru, inilah seni mendidik. Seorang guru harus mampu memberikan motivasi agar anak tetap semangat untuk belajar.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Bunyamin dan Diah Faujiah yang berjudul ”Pengaruh Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS di SDN Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka”**,** menunjukkan bahwa hasil belajar IPS siswa bisa dipengaruhi oleh motivasi guru.

Selain harus memiliki kemampuan untuk memotivasi semangat belajar para siswanya guru juga harus memiliki kompetensi untuk mengelola pembelajarannya. Menurut Hendy Hermawan guru adalah ”orang yang sangat berperan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. Seorang guru perlu mengingat bahwa kesuksesan belajar siswa juga dipengaruhi oleh cara seorang pengajar mengelola proses pembelajarannya”. (Hermawan, 2006:V).

Dari sini tampak bahwa peranan pendidik dalam kegiatan pembelajaran amatlah besar, seorang pendidik harus mempunyai kompetensi yang cukup dalam menyajikan pembelajarannya. Seorang guru bukan hanya mampu menguasai materi pelajaran yang dia ampuh, tetapi lebih dari itu ia juga harus dapat mengelola kelasnya dengan sebaik mungkin dan menyampaikan pembelajarannya dengan menarik sehingga siswa merasa menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran tersebut.

Pada Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas secara jelas disebutkan bahwa ”guru harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (UU No. 20 Tahun 2003).

Sejalan dengan hal ini dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8 kembali ditegaskan bahwa ”guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (UU No.14 Tahun 2005). Dari dua kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru yang profesional ada dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu memiliki Jenjang Pendidikan minimal (D4/S1) dan memiliki kemampuan dasar mengajar.

Sejak lahirnya UU No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen istilah sertifikasi menjadi sangat terkenal, karena sertifikasi selalu dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan para guru dan dosen. Hal ini tidaklah salah karena seorang guru atau dosen yang telah bersertifikasi berhak menerima tambahan penghasilan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulannya. Namun anggapan ini menjadi sangat menyesatkan tatkala sertifikasi hanya identik dengan peningkatan kesejahteraan tanpa diiringi dengan peningkatan kompetensi pendidik, kualitas pembelajaran yang pada akhirnya tidak membawa manfaat bagi peningkatan kualitas hasil belajar para peserta didik.

Secara skematis, logika berpikir tentang kedudukan sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kedudukan sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan

 (Samani, 2010:4)

Dari skema ini tergambar pada kita bahwa sertifikasi guru bertujuan guna memperoleh guru yang kompeten dan profesional, yang mempunyaii kemampuan yang handal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga menghasilkan tamatan dengan hasil belajar yang baik pula. Artinya sertifikasi tidak hanya terhenti pada konteks peningkatan kesejehteraan saja, tetapi lebih dari itu sertifikasi juga harus diartikan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru.

Menurut Mulyasa indikator karakteristik guru yang kompeten dan profesional ialah “mampu mengembangkan tanggungjawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas” (Mulyasa, 2009:18)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa ”kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola peserta didik, kompetensi kepribadian adalah kemampuan menjadi teladan peserta didik, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran, dan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berinteraksi dengan semua elemen pendidikan” (UU No.14 Tahun 2005)

Jika memperhatikan beberapa kebijakan maupun teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya motivasi serta kompetensi guru dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Namun dalam pelaksanaannya ada banyak guru yang mengajar dengan apa adanya entah karena ketidakmauan mereka atau justru karena ketidakmampuan mereka.

Dari sisi motivasi tidak semua guru pandai memotivasi, karena motivasi itu adalah seni dia butuh kemampuan verbal dan kharisma yang kuat. Kalaupun ia mampu untuk itu ia belum tentu mau karena motivasi terkadang membosankan dan memakan waktu yang lama, sementara di sisi lain guru juga dituntut untuk menyelesaikan materi pelajaran yang terkadang juga menumpuk.

Dari sisi kompetensi tidak kalah pelik permasalahannya. Ada sebagian guru yang mempersiapkan diri betul-betul ketika akan mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG), namun ketika sudah lulus ia kembali kepada kebiasaan lama. Adapula guru yang telah lama masa kerjanya, cukup kualifikasi pendidikannya namun tidak dipanggil-panggil untuk mengikuti UKG akhirnya dia menjadi malas dan mengajar apa adanya. Ada pula guru yang sudah bersertifikasi namun dia tidak cukup jam mengajar (24 jam) akhirnya tidak mendapatkan tunjangan profesi dan ia pun menjadi malas. Dan yang paling krusial adalah kompetensi guru sepertinya hanya berkutat pada unsur pedagogik dan profesional saja sementara unsur kepribadian dan sosial kurang mendapat perhatian. Sehingga seorang guru yang memiliki setumpuk dokumen pembelajaran dianggap sudah kompeten meskipun ia tidak bisa dijadikan teladan bagi anak didiknya dan malas untuk mengembangkan dirinya.

Melihat seluk beluk motivasi, kompentensi guru, dan hasil belajar dengan segala permasalahannya ini, penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian agar bisa memberikan sedikit kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk lokus penelitian penulis memilih sekolah-sekolah negeri yang ada pada sub-rayon 2 kota Prabumulih, karena penulis merasa bahwa sekolah-sekolah negeri yang ada di sub-rayon 2 ini yakni SMP Negeri 2 Prabumulih, SMP Negeri 6 Prabumulih dan SMP Negeri 8 Prabumulih cukup mewakili hasil penelitian ini, karena secara lokasi ketiga sekolah ini memiliki kekhasan masing-masing. SMP Negeri 2 terletak di daerah perkotaan, SMP Negeri 8 terletak dipinggiran kota, sedangkan SMP Negeri 6 terletak di daerah pedesaan. Selain itu ketiga SMP ini mempunyai prestasi-prestasi yang cukup mentereng, Ketiganya adalah sekolah adiwiyata, sekolah sehat dan sama-sama berakreditasi A. Alasan lainnya karena persentasi guru bersertifikasi cukup banyak. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka penelitian ini diberi judul ”Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Guru terhadap Hasil Belajar Siswa SMP Negeri di Sub Rayon 2 Kota Prabumulih”

1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang sebelumnya masalah-masalah yang bisa identifikasi yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia Indonesia tergolong masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami kemajuan, namun jika dibandingkan dengan negara lain Indonesia masih tertinggal. Indonesia berada di peringkat 6 ASEAN dan 111 di dunia dari 189 negara.
2. Secara kuantitas kondisi pendidikan Indonesia belum memuaskan, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya angka partisipasi sekolah anak usia sekolah (7-24 Tahun). Rendahnya APS disebabkan oleh faktor sosial dan faktor lingkungan. Dibidang sosial penyebab terbesar adalah faktor kemiskinan, masalah ini telah direspon oleh pemerintah dengan meluncurkan berbagai program seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi, GN OTA, dan Universitas Terbuka. Sementara itu di bidang lingkungan rendah APS disebabkan oleh posisi daerah tersebut yang terisolir, dan masalah inipun telah direspon oleh pemerintah dengan program Pendidikan Daerah Terpencil, Terluar, Terisolir dan **program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang salah satu sub programnya adalah Sarjana Mendidik Daerah 3T (SM-3T).**
3. Secara kualitas kondisi pendidikan Indonesia juga masih memprihatinkan. Memang banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti kurikulum, sarana prasarana dan pembiayaan, namun faktor guru adalah faktor yang terpenting dalam proses pembelajaran. Sebagai tenaga pendidik yang profesional seharusnya seorang guru harus selalu memberikan motivasi belajar kepada siswanya dan juga memanfaatkan segala kompetensi yang dimiliki untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Namun masih banyak guru yang malas untuk sedikit memberikan motivasi belajar pada siswa, dan masih banyak pula guru yang telah bersertifikasi namun tidak ada perubahan pada dirinya dalam mengelola pengajaran, sama saja antara sebelum dia bersertifasi dengan setelah bersertifikasi. Sertifikasi sepertinya terhenti pada konteks peningkatan kesejateraan saja belum sampai pada konteks peningkatan kompetensi. Prilaku guru seperti ini bisa jadi akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
4. **Pembatasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini dibatasi pada tiga masalah yaitu:

1. Pengaruh motivasi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih
2. Pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih
3. Pengaruh motivasi dan kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih
4. **Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh motivasi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih?
2. Apakah pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih?
3. Apakah ada pengaruh motivasi dan kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih
4. **Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi dan kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri se-sub rayon 2 Kota Prabumulih.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat peneitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
	1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keilmuan tentang motivasi, kompetensi dan hasil belajar.selanjutnya, meskipun penelitian ini tidak sebagus dan sedetail penelitian yang lain.
	2. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagaimana caranya agar motivasi dan kompetensi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Manfaat Praktis
3. Memberikan masukan kepada pemerintah serta lembaga struktural dibawahnya mengenai berbagai masalah pendidikan, khususnya dibidang motivasi, kompetensi, dan hasil belajar.
4. Memberikan kontribusi kepada sekolah terutama kepada para pengambil keputusan di sekolah untuk menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk melakukan pembinaan terhadap para guru.
5. Bagi para guru penelitian dapat dijadikan sebagai alat introspeksi diri apakah sejauh kini telah menjalankan amanah kita sebagai guru.